

**DISKURSUS KHILAFAH ISLAMİYAH DI INDONESIA  
(ANALISIS WACANA KRITIS BULETIN DAKWAH *AL-ISLAM*, *KAFFAH*,  
DAN TABLOID *MEDIA UMAT*)**

Bugi Kenoh Mulyar  
(bugi.kenoh@gmail.com)

**Magister Media dan Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Universitas Airlangga**

---

**Abstract**

Media has an important role in the process of distribution of ideology to the audience. This is in accordance with what has been done by the news bulletin *Al-Islam*, *Kaffah*, and *Media Umat* tabloid. They are consistent to propagate the da'wah of the implementation of islamic shari'ah holistically through the application of the islamic caliphate. This study focuses on how the islamic caliphate discourse is articulated. The method used in this research is qualitative text-based with critical discourse analysis Norman Fairclough.

The results show that *Al-Islam* and *Kaffah* da'wah bulletin show religious ideology as the main narrative. This refers to how the islamic caliphate discourse is articulated as islamic teachings and obligations for Muslims. Whereas *Media Umat* tabloid present political ideology as the main narrative. This refers to how the caliphate discourse is articulated as a solution to a multidimensional crisis. Where to support this discourse required other sociocultural factors. The battle of discourse on the application of the islamic caliphate is due to distortion to the understanding of religious texts, ie, textual and contextual understanding.

***Keywords: media, ideology, islamic caliphate, distortion.***

---

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana diskursus khilafah islamiyah diartikulasikan melalui buletin serta tabloid sebagai sarana media dakwah dan politik. Penelitian ini menarik untuk dilakukan mengingat khilafah islamiyah dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi umat Islam serta solusi yang komprehensif bagi berbagai krisis multidimensi yang mendera Indonesia hingga saat ini. Padahal, opsi menegakkan khilafah tentu akan menyebabkan benturan terhadap berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Khilafah islamiyah memiliki pengertian yakni sistem pemerintahan yang keseluruhan hukum-hukumnya adalah berdasarkan hukum-hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' Sahabat dan Qiyas. Secara bahasa, khilafah memiliki makna menggantikan atau menempati tempatnya dimana terdapat penggantian yang dilakukan oleh orang kedua karena kedatangannya memang untuk menggantikan posisi orang

pertama. Khilafah juga memiliki pengertian yakni lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu konsep khilafah juga dijelaskan sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Islam.

Gagasan penerapan kembali khilafah islamiyah di Indonesia sendiri secara lantang disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Sebagai gerakan Islam transnasional, mereka tentu memiliki pandangan kuat atas apa yang telah mereka perjuangkan selama ini, yakni menegakkan kembali ideologi khilafah islamiyah. Hizbut Tahrir Indonesia mengklaim, bahwa krisis ekonomi dan politik yang mendera Indonesia merupakan puncak dari gagalnya penerapan prinsip-prinsip sekuler dan demokratis.

Pengartikulasian gagasan khilafah islamiyah oleh Hizbut Tahrir Indonesia sendiri dilakukan melalui beberapa macam metode rekrutmen, salah satunya adalah menggunakan

media saluran intelektual dan berpotensi seperti publikasi Buletin *Al-Islam*, diadakannya seminar, debat, hingga konferensi-konferensi.

Persebaran ideologi sendiri sangat berhubungan dengan konsep bagaimana pandangan terhadap dunia, sistem kepercayaan dan nilai, bahkan lebih luas dari ketiga hal tersebut. Dimana tidak hanya mengacu kepada keyakinan yang dimiliki terhadap dunia, namun juga pada cara-cara mendasar dimana dunia didefinisikan. Kemudian, ideologi tidak terbatas pada lingkup politik, namun memiliki makna konotasi yang lebih luas dan lebih mendasar.

Melalui buletin dan tabloid inilah kemudian bahasa memiliki peran strategis dalam proses konstruksi ideologi. Dimana melalui bahasa, seseorang atau kelompok dapat ditampilkan atau didefinisikan. Bahasa juga dianggap memiliki muatan ideologi tertentu, dimana bahasa memiliki kuasa untuk memberikan pengaruh, persuasi, hingga konstruksi akan sebuah realitas. Bahkan realitas

tersebut menjadi terdistorsi karena kuasa dari bahasa tersebut.

Bahasa, pada dasarnya adalah sarana komunikasi yang sentral dan digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan membangun realitas. Yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana sifat bahasa dan hubungannya terhadap bagaimana memandang dunia. Setidaknya ada dua konsep yang membahas bagaimana hubungan antara bahasa dan dunia.

Melihat adanya berbagai dinamika perkembangan pada media dakwah yang membahas mengenai diskursus khilafah islamiyah, maka peneliti akan menempatkan buletin dakwah *Al-Islam*, *Kaffah*, dan tabloid *Media Umat* sebagai produk komunikasi yang dianggap mampu untuk menggambarkan ideologi khilafah islamiyah yang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat.

Tiga media tersebut dipilih sebagai obyek yang dikaji adalah karena meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam pola penulisan dan gagasan namun secara ideologi tentu ada yang berbeda yakni dalam hal

gagasan khilafah dan upaya penerapannya di Indonesia. Peneliti memilih tiga media tersebut supaya mampu menggambarkan bagaimana tren yang ada dalam media partisan dalam membahas diskursus khilafah.

Disisi lain, masing-masing buletin dakwah *Al-Islam* tabloid *Media Umat* masing-masing jelas afiliasinya dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Dimana hal tersebut dikonfirmasi oleh M. Ismail Yusanto (juru bicara HTI) bahwa pasca pembubaran HTI pada 19 Juli 2017, praktis seluruh kegiatan dan usaha ormas tersebut juga berhenti. Ia mengatakan bahwa tabloid *Media Umat* dan majalah lainnya (*Al-Wa'ie*) berhenti beroperasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana wacana khilafah islamiyah diartikulasikan serta bagaimana ideologi media ditampilkan dalam buletin dakwah *Al-Islam*, *Kaffah*, dan tabloid *Media Umat*?

## **METODE PENELITIAN**

Kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mamahami pesan simbolik dalam wacana atau teks, dalam konteks ini terkait dengan bagaimana ideologi khilafah islamiyah diartikulasikan melalui buletin dakwah *Al-Islam*, *Kaffah*, dan tabloid *Media Umat*.

Pisau analisis wacana kritis akan digunakan untuk membedah bagaimana konstruksi ideologi yang coba dibangun melalui penggunaan bahasa dalam buletin dakwah *Al-Islam*, *Kaffah*, dan tabloid *Media Umat*. Metode yang diperkenalkan oleh Norman Fairclough ini menekankan terhadap pentingnya konteks yang melingkungi dari sebuah teks itu. Bahwasanya teks tidak bisa dilepaskan begitu saja dari peristiwa sosial, politik, budaya yang sedang terjadi ketika teks tersebut diproduksi.

Penelitian mengenai konstruksi ideologi dalam teks-teks media dakwah dan politik ini menggunakan tipe penelitian eksploratif. Dimana

penelitian ini dilakukan untuk menggali data beserta informasi mengenai isu keagamaan serta konstelasi sosial, politik dan budaya di Indonesia untuk memaknai gagasan khilafah islamiyah.

Kemudian tipe penelitian eksploratif digunakan untuk mendapatkan seperangkat pengetahuan mendalam yang selanjutnya akan digunakan untuk menyusun kerangka dan implementasi dari kajian yang lebih sistematis. Dalam hal ini, bagaimana ideologi khilafah islamiyah diartikulasikan melalui buletin *Al-Islam*, *Kaffah*, dan tabloid *Media Umat*. Serta untuk mengetahui pula bagaimana sirkulasi wacana khilafah islamiyah yang berkembang dinamis di lingkup masyarakat.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga edisi buletin dakwah *Al-Islam*, dua edisi buletin dakwah *Kaffah* dan dua edisi tabloid *Media Umat*. Data primer (*primary data*) merupakan data yang diperoleh berdasarkan objek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wacana penegakan khilafah islamiyah melalui

tiga edisi teks buletin dakwah *Al-Islam*, dua edisi buletin dakwah *Kaffah*, dan dua tabloid *Media Umat*.

Analisis teks dilakukan dalam tiga tahapan. *Pertama* adalah menguraikan isi dan analisis secara deskripsi atas teks. Dalam tahapan ini teks dijelaskan tanpa dihubungkan dengan teks lain. Dengan kata lain, tahapan ini berfokus pada analisis isi dan bahasa yang dipakai dalam tajuk tersebut.

*Kedua*, adalah menafsirkan teks yang dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. Pada tahap ini teks tidak sekedar dideskripsikan, namun ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan bagaimana proses produksi teks dibuat. Intinya, analisis atas isi dan bahasa yang dipakai dalam tajuk dihubungkan dengan konsep jurnalisme Islam yang menganut berbagai nilai-nilai yang sangat Islami. *Ketiga*, adalah mencari penjelasan atas hasil penafsiran peneliti pada tahap kedua. Penjelasan tersebut dapat diperoleh dengan

menghubungkan produksi teks dengan praktik sosiokultural.

## **ANALISIS WACANA KRITIS**

*Critical Discourse Analysis* (CDA) merupakan studi yang berhubungan dengan kausalitas dan determinasi antara praktik diskursif, kejadian, teks, struktur, serta hubungan dan proses sosial dan budaya yang lebih luas. Berbagai relasi tersebut digunakan untuk menyelidiki bagaimana sebuah teks mampu hadir dan dibentuk secara ideologis oleh hubungan kekuasaan dan perjuangan untuk menundukkan. Ideologi juga memiliki peran dalam CDA, dimana ideologi dipandang sebagai kerangka interpretasi yang mengatur seperangkat sikap tentang elemen masyarakat modern. Ideologi dianggap mampu memberikan fondasi pemikiran berbagai kelompok masyarakat dalam masyarakat untuk mengambil keputusan sesuai tujuan dan kepentingan mereka sendiri.

CDA pada dasarnya tidak sekedar analisis sebuah pesan atau teks komunikasi dalam media, tidak hanya berkutat pada bagaimana isi teks berita

yang ditampilkan. Namun, analisis wacana kritis mencoba untuk mendapatkan bagian terdalam dari sebuah berita. Analisis wacana kritis mencoba untuk mencari bagaimana dan mengapa pesan tersebut hadir. Pada tahap selanjutnya, analisis wacana kritis bahkan mampu mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, ketidakadilan, dan pemarginalan yang dijalankan dan diproduksi secara bias melalui wacana berita surat kabar. Analisis *discourse* tidak dalam ranah untuk berargumentasi melawan validitas dan kebenaran dari metode penelitian tertentu atau pernyataan atau nilai tertentu. Namun lebih berfokus terhadap keberadaan (*existence*) dan pesan (*message*) atau isi dari teks-teks tersebut dan menempatkan teks-teks itu dalam konteks historis dan sosial.

*Critical Discourse Analysis* merupakan pisau analisis yang relevan untuk membahas penelitian mengenai konstruksi ideologi Khilafah Islamiyah. Dimana pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek kebahasaan, namun juga melihat pentingnya praktik produksi dan konsumsi teks serta

konteks sosiokultural yang melingkupi sebuah teks.

## IDEOLOGI AGAMA DALAM BULETIN DAKWAH AL-ISLAM & KAFAH

Agama sebagai ideologi pada dasarnya berfungsi sebagai proses pembentukan identitas individu ataupun kelompok. Sedangkan konstruksi identitas akan memberikan kesadaran untuk mempercayai segala kebenaran yang disampaikan oleh sebuah agama. Agama sebagai ideologi tentu tidak hanya dipahami sebagai ritual semata, namun juga terkait dengan nilai-nilai kepercayaan dan komitmen.

Dalam konteks ideologi media, buletin dakwah *Al-Islam* dan *Kaffah* lebih menonjolkan aspek-aspek keagamaan seperti penggunaan ayat dan hadist Nabi dalam proses penyebaran ideologi khilafah islamiyah yang konsisten mereka lakukan. Ideologi agama terasa kental dalam buletin dakwah *Al-Islam* dan *Kaffah* karena mereka mengartikulasikan

pentingnya penarapan khilafah melalui formalisasi syari'ah dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, mereka menganut nilai-nilai kepercayaan yang bersumber pada falsafah agama yang tercantum dalam kitab suci agama Islam, yakni Al-Qur'an.

## KHILAFAH SEBAGAI AJARAN ISLAM



Gambar 1.1. Khilafah Ajaran Islam (Sumber: Tabloid Media Umat edisi 198)

Seperti yang termuat dalam Tabloid *Media Umat* edisi 198 dibawah, terdapat narasi yang diusung

yakni “Khilafah Ajaran Islam”. Diskursus mengenai khilafah dibuka dengan tuduhan bahwa pemerintah RI sedang berusaha untuk menghentikan organisasi yang mendakwahkan Islam secara kaffah. Presiden juga mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya akan ‘menggebuk’ organisasi-organisasi anti-Pancasila.

Hal yang sama juga akan diterapkan apabila Partai Komunis Indonesia (PKI) atau organisasi berbasis komunis lainnya berdiri di Indonesia. Disisi lain, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia menolak bahwa organisasinya dikatakan ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945. Secara tegas ia menyatakan bahwa kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia sudah sesuai dengan UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dimana Islam tidak disebut sebagai paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini merujuk pada pasal 59 yang disebutkan bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ateisme, komunisme/marxisme dan leninisme, bukan Islam.

Di sisi lain, penerapan khilafah islamiyah sebagai sistem pemerintahan negara masih mengalami ketidakjelasan pula dalam konsep agama dan negara. Perlu diketahui, konsep negara Islam dari dahulu hingga saat ini belum mencapai kata sepakat dan masih sangat dinamis. Pasca runtuhnya kekhalifahan oleh Mustafa Kemal Attaturk (1924), tokoh-tokoh intelektual seperti Hasan Al-Banna, Maududi, hingga Bani Sadr terlibat aktif dengan perumusan konsep “negara Islam”. Sementara di Indonesia, nama Muhammad Natsir (mantan pemimpin Masyumi) juga perlu untuk diingat sebagai salah seorang ulama yang banyak berkontribusi dalam perumusan konsep negara.

Istilah “negara Islam” secara formalistik tidak pernah digunakan oleh Nabi Muhammad hingga para penerusnya selama berabad-abad. Bahkan, Nabi Muhammad lebih menekankan terhadap pentingnya pembinaan umat daripada pembentukan “negara”. Pemilihan



nama Madinah untuk penyebutan suatu “wilayah” sendiri lebih didasarkan pada kepentingan menciptakan masyarakat “kota” yang berbudaya tinggi yang kemudian teruji mampu menghasilkan entitas sosial politik tertentu. Istilah “negara Islam” sendiri justru muncul ditengah kalangan umat sebagai gejala baru di era kontemporer. Istilah “negara Islam dapat dilacak berdasarkan studi yang berkaitan dengan proses interaksi umat dengan golongan-golongan lain.

### **KHILAFAH SEBAGAI KEWAJIBAN BAGI UMAT ISLAM**

Klaim khilafah sebagai kewajiban bagi umat Islam didasarkan pada sejumlah dalil syariah yakni: Al-Quran, as-sunnah, ijmak sahabat, dan qiyas syar’iyyah. Berbagai dalil (Al-Qur’an, as-Sunnah, dan ijmak sahabat) terkait apa dan bagaimana itu khilafah kembali digunakan sebagai bentuk seruan kepada pembaca bahwa khilafah merupakan ajaran Islam

Di sisi lain, berdasarkan perspektif hukum Islam terdapat

serangkaian kegiatan ibadah atau aktivitas yang harus atau wajib dilaksanakan. Status hukum ini disebut fardhu yang memiliki arti yang sangat dekat dengan status hukum wajib. Fardhu sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni *fardhu ‘ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu ‘ain* mewajibkan tiap-tiap individu untuk melakukan serangkaian kegiatan atau aktivitas ibadah. Sementara *fardhu kifayah* tidak mewajibkan tiap-tiap individu untuk melakukan serangkaian kegiatan atau aktivitas ibadah. Dengan kata lain, status *fardhu kifayah* akan gugur apabila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lainnya.

Ulama Ahlus Sunnah yang lain, Ibnu Hajar al-Asqalani, juga menegaskan:

[وَأَمَّا عَلَى أَنَّهُ يُجِبُ نَتِيبَ خَلِيفَةٍ وَعَلَى أَنَّ الْخُلُوفَةَ بِالشَّرْحِ لَا بِالْعُقُولِ]

Mereka (para ulama) telah berijmak (bersepakat) bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal (Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bâri*, XII/205).

Imam Abu Ya'la al-Farra' juga menyatakan:

[تَصْنِيفُ الْإِيمَانِ وَاجِبَةٌ]

Mengangkat Imam (Khalifah) adalah wajib (Abu Ya'la Al Farra', *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, hlm. 19).

Berdasarkan hal ini, jelaslah hukum menegakkan Khilafah adalah fardhu/wajib. Kita tahu, wajib itu bila dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Karena itu jelas, berdiam diri, tidak berjuang menegakkan Khilafah bagi kaum Muslim, merupakan suatu kemaksiatan. Apalagi pada Khilafahlah bergantung banyak pelaksanaan hukum Islam. Artinya, tanpa Khilafah, banyak hukum Islam—sebagaimana saat ini—tidak dapat dilaksanakan. Bahkan eksistensi Islam di tengah kehidupan pun bergantung pada adanya Khilafah. Oleh karena itu, hal pertama yang penting segera kita lakukan adalah bergandeng tangan untuk menunaikan kewajiban ini, yakni berjuang mewujudkan kembali Khilafah.

### Janji Allah SWT

Kembalinya Khilafah—sebagai wujud kekuasaan real umat Islam—sekaligus merupakan janji dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh di antara kalian, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai (Islam); dan akan mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan, menjadi aman sentosa (TQS an-Nur [24]: 55).

### Bisyarah Rasulullah saw.

Kembalinya Khilafah bahkan merupakan kabar gembira (*bisyârah*) dari Rasulullah saw. Setelah era para penguasa diktator (*mulk[an] jabbrî[an]*) akan lahir *Khilafah 'ala minhâj an-nubuwwah* untuk kedua kalinya. Rasulullah saw., sebagaimana dituturkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman, telah bersabda:

«كُم تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مَنَاجِ التُّبُوَّةِ...»

...Kemudian akan ada kembali *Khilafah 'ala minhâj an-nubuwwah* (HR Ahmad).

Sungguh, janji Allah SWT bahwa kaum Muslim akan kembali berkuasa pasti benar. Demikian pula berita gembira dari Rasulullah saw. tentang akan kembalinya Khilafah *'ala minhâj an-nubuwwah* ke tengah-tengah umat.

Sungguh, jika Allah SWT berjanji, pasti Dia akan memenuhi janji-Nya. Namun demikian, janji Allah SWT tidak cukup sekadar diyakini, tetapi benar-benar harus kita wujudkan. Karena itu tidak boleh siapa pun berdiam diri menegakkan kembali syariah dan Khilafah dengan dalih bahwa itu sudah

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan kalian

Mohon tidak diletakkan sembarang karena terdapat ayat suci Al Qur'an

Gambar 1.2  
hilafah sebagai *fardhu kifayah*.  
(sumber: Buletin Dakwah Al-Islam edisi 853)

## IDEOLOGI POLITIK DALAM TABLOID MEDIA UMAT

Ideologi politik merupakan sebuah seperangkat ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan tatanan atau struktur masyarakat tertentu. Ideologi politik

biasaya juga mengenai bagaimana mekanisme mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilakukan. Dalam konteks ideologi media, tabloid *Media Umat* mencoba menghadirkan khilafah islamiyah dalam tataran praktis, dimana khilafah dinarasikan sebagai solusi atas krisis multidimensi. Jika dibandingkan dengan buletin

dakwah *Al-Islam* dan *Kaffah* yang cenderung menyebarkan ideologi dengan berbasis teks agama, maka tabloid *Media Umat* memilih untuk menyebarkan ideologi dengan menggunakan konsep-konsep kepemimpinan dan faktor sosial politik. Dalam konteks Indonesia misalnya, demokrasi adalah akar dari kehancuran. Maka dari itu khilafah adalah solusinya. Sedangkan dalam mekanisme penerapannya, khilafah dinarasikan sebagai sistem yang berbeda dengan sistem yang ada di negara lain seperti republik, federasi, kekaisaran, dan sebagainya.

#### **KHILAFAH SEBAGAI SOLUSI ATAS KRISIS MULTIDIMENSI**

Dalam konteks Indonesia sendiri, krisis yang dialami oleh umat Islam di Indonesia sendiri cukup berliku mulai dari kemiskinan, budaya korupsi, kenakalan remaja, pergaulan bebas hingga berbagai perilaku dekadensi moral. Berbagai permasalahan multidimensi ini dianggap oleh golongan tertentu sebagai konsekuensi logis dari

penerapan sistem yang pro-Barat. Kapitalisme dan liberalisme dianggap sebagai pintu lebar bagi penjajahan asing.

Melihat akan berbagai krisis yang dialami Indonesia, maka syariah dan khilafah adalah sebuah solusi. Persis seperti apa yang tertera dalam penggalan tabloid *Media Umat* edisi 173 dibawah. Tabloid ini mendeskripsikan bahwa sistem Barat dan ide-ide yang tidak islami harus disingkirkan dan kehidupan islami wajib dilanjutkan kembali dengan penerapan hukum-hukum syariah yang lurus melalui kekuasaan, yang eksistensinya telah diwajibkan oleh syariah, yaitu Daulah al-Khilafah.

Kemudian, khilafah diharapkan mampu tegak kembali dan menjadi solusi dari segala kerusakan yang terjadi di muka bumi. Dimana khilafah akan mampu menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan serta menghasilkan kerahmatan bagi seluruh Alam.

Muhammad Rahmat Kurnia,  
Ketua Lajnah Fa'aliyah DPP HTI

# Syariah dan Khilafah adalah Solusi

Di tengah upaya Hukuk Tahrir Indonesia (HTI) menyebarkan masyarakat agar menjadikan syariah dan khilafah sebagai solusi atas krisis multidimensi, muncul agendator orang yang menyatakan bahwa syariah dan khilafah adalah ancaman. Lantas siapa sebenarnya yang mengancam bahkan menatai negeri ini? Dan mengapa syariah dan khilafah sebagai solusi? Simak jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Ketua Lajnah Fa'aliyah DPP HTI Muhammad Rahmat Kurnia. Berikut petikannya



### Sejarah syariah dan khilafah merupakan ancaman bagi negeri ini?

Syariah dan khilafah bukan ancaman, melainkan solusi. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia dan negeri-negeri kaum Muslim sedang mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya. Kita ini sudah mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

Hal yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem politik, ekonomi, dan sebagainya. Kita ini sudah mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

### Tapi mengapa orang dilakikan dengan beban tidak terbayar?

Hal ini disebabkan oleh sistem politik yang ada di negeri ini. Kita ini sudah mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

### Sejarah syariah dan khilafah merupakan ancaman bagi negeri ini?

Syariah dan khilafah bukan ancaman, melainkan solusi. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia dan negeri-negeri kaum Muslim sedang mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

Hal yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem politik, ekonomi, dan sebagainya. Kita ini sudah mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

### Tapi mengapa orang dilakikan dengan beban tidak terbayar?

Hal ini disebabkan oleh sistem politik yang ada di negeri ini. Kita ini sudah mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

### Sejarah syariah dan khilafah merupakan ancaman bagi negeri ini?

Syariah dan khilafah bukan ancaman, melainkan solusi. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia dan negeri-negeri kaum Muslim sedang mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

Hal yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem politik, ekonomi, dan sebagainya. Kita ini sudah mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

### Tapi mengapa orang dilakikan dengan beban tidak terbayar?

Hal ini disebabkan oleh sistem politik yang ada di negeri ini. Kita ini sudah mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

### Sejarah syariah dan khilafah merupakan ancaman bagi negeri ini?

Syariah dan khilafah bukan ancaman, melainkan solusi. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia dan negeri-negeri kaum Muslim sedang mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

Hal yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem politik, ekonomi, dan sebagainya. Kita ini sudah mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

### Tapi mengapa orang dilakikan dengan beban tidak terbayar?

Hal ini disebabkan oleh sistem politik yang ada di negeri ini. Kita ini sudah mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

### Sejarah syariah dan khilafah merupakan ancaman bagi negeri ini?

Syariah dan khilafah bukan ancaman, melainkan solusi. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia dan negeri-negeri kaum Muslim sedang mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

Hal yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem politik, ekonomi, dan sebagainya. Kita ini sudah mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

### Tapi mengapa orang dilakikan dengan beban tidak terbayar?

Hal ini disebabkan oleh sistem politik yang ada di negeri ini. Kita ini sudah mengalami krisis multidimensi. Kita ini sudah menderita dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

Gambar 1.3. Syariah dan khilafah adalah solusi (sumber: Tabloid Media Umat edisi 173)

Disisi lain, dengan menimbang bahwa dalam Al-Qur'an hanya terdapat seruan untuk mengangkat pemimpin (khalifah) dan bukan menentukan bagaimana detail dari sistem pemerintahannya, maka khilafah sejatinya bersifat akomodatif. Berdasarkan hal ini, bisa dipahami pula

bahwa sistem turunan dari formalisasi bentuk khilafah pada dasarnya juga buatan dari manusia. Hal ini tentu membawa konsekuensi pada lenturnya sistem khilafah itu sendiri, tidak kaku seperti wacana yang digulirkan selama ini bahwa akan terbentuk khilafah melalui gabungan negara-negara Islam

dari seluruh penjuru dunia (transnasionalisme).

Sebagai pengetahuan, bahwa selepas masa *Khulafa ar-Rasyidin*, tepatnya pada masa Umayyah dan awal masa Abbasiyah hanya terdapat satu khalifah untuk semua umat Islam. Kemudian beberapa tahun kemudian dimasa Abbasiyah, Cordova (Andalusia) juga memisahkan diri dan punya kekhalifahan sendiri (Umayyah II). Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa khilafah itu tidak hanya satu, melainkan bisa ada dua bahkan tiga khalifah pada saat bersamaan.

Adanya klaim bahwa khilafah merupakan solusi atas krisis multidimensi yang mendera umat Islam di dunia seakan menafikkan fakta sejarah bahwa ada berbagai konflik dan intrik yang terjadi dalam sistem khilafah di masa lampau. Sejarah mencatat bahwa ketika Bani Abbasiyah merebut khilafah, darah tertumpah dimana-mana. Kemudian khilafah pasca khulafaur rasyidin juga mencatatkan tinta buruk yakni

perubahan cara hidup para khalifah, hilangnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat, hilangnya kebebasan peradilan hingga munculnya kefanatikan kesukuan.

## **PENUTUP**

Wacana khilafah khilafah islamiyah diartikulasikan oleh buletin dakwah *Al-Islam*, *Kaffah*, dan tabloid *Media Umat* menjadi tiga poin, yakni: khilafah sebagai ajaran Islam, khilafah sebagai kewajiban bagi umat Islam, dan khilafah sebagai solusi atas krisis multidimensi. Ideologi media sendiri terklasifikasi menjadi dua yakni ideologi agama yang direpresentasikan oleh buletin dakwah *Al-Islami dan Kaffah*, serta ideologi politik yang direpresentasikan oleh tabloid *Media Umat*.

Ideologi agama dalam buletin dakwah *Al-Islam* merujuk pada bagaimana penggunaan falsafah agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Media ini menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai legitimasi klaim bahwa khilafah adalah ajaran Islam dan kewajiban bagi umat

Islam. Sedangkan ideologi politik dalam tabloid *Media Umat* merujuk pada tataran praktis. Dalam konteks ini adalah bagaimana implementasi khilafah jika diterapkan kembali di muka bumi melalui mekanisme pemilihan pemimpin yang berbeda dengan sistem yang ada di belahan dunia seperti demokrasi, republik, federasi, dan sebagainya.

Upaya penegakan kembali khilafah di Indonesia yang mereka klaim sebagai sarana untuk berdakwah ini dilakukan dengan mengajukan klaim bahwa segala bentuk kerusakan di muka bumi khususnya yang dialami umat Islam dikarenakan berbagai paham kebaratan seperti kapitalisme, liberalisme, dan sekulerisme. Khususnya di Indonesia, sistem demokrasi yang diterapkan juga menjadi salah satu dari penyebab maraknya korupsi di Indonesia. Tidak

diterapkannya syari'ah Islam secara *kaffah* di Indonesia juga disinyalir sebagai penyebab dari kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas, LGBT, hingga perilaku seks bebas yang marak di kalangan remaja.

Yang menarik, sirkulasi wacana penegakan khilafah islamiyah dalam media ini mengalami distorsi komunikasi. Penggunaan istilah distorsi disini merujuk terhadap adanya pergeseran pemaknaan akan sebuah pesan atau teks. Dalam penelitian ini, penyampaian gagasan khilafah islamiyah oleh komunikator benar telah sampai kepada komunikan. Namun adanya faktor sosial, politik, ekonomi, hingga budaya yang amat sangat dinamis tentu berdampak terhadap adanya juga perubahan terhadap bagaimana membaca serta memahami sebuah teks.

## REFERENSI

- \_\_\_\_\_. Diakses dari <https://x.detik.com/detail/investigasi/20170727/Edisi-Terakhir-Media-Propaganda-HTI/index.php>, diakses pada 26 Juli 2018.
- Atkins, Andrew. 2002. "Critical Discourse Analysis: a Letter to expatriates from the Rt. Hon. Sir Norman Fowler MP".
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta. Kencana
- Buletin dakwah Kaffah edisi 022. 5 Januari 2018
- Croteau, David., Hoynes, William. 2003. *Media Society: Industries, Images, and Audiences*. London. SAGE Publications.
- Dellinger, Brett. 1995. "Critical Discourse Analysis".
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta. LKiS.
- Hosen, Nadirsyah. 2016. Khilafah Islam, Fiktif!. Available at: <http://nadirhosen.net/artikel-isnet/262-khilafah-islam-fiktif>. Accessed on 28 May 2018.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde-Baru*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Budi. 2008. "Wacana Khilafah dalam Kajian Hubungan Internasional". Dapat diakses melalui <https://hbmulyana.wordpress.com/2008/01/19/wacana-khilafah-dalam-kajian-hubungan-internasional/>, diakses pada 26 Juli 2018.
- Osman, Mohammed Nawab Mohammed. 2010. "The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia". South East Asia Research. DOI: 10.5367/sear.2010.0018. 735-755.
- Qaradhawi, Yusuf. 1995. *Fiqh Prioritas*. Diterjemahkan oleh Bahruddin F. Jakarta. Robbani Press.
- Riyadi, Dedi Slamet. 2008. *Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*. Skripsi. Semarang.
- Sudrajat, Ajat. 2007. "Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Sejarah". Dapat diakses melalui [journal.uny.ac.id](http://journal.uny.ac.id), diakses pada 26 Juli 2018